

Peran Masyarakat Lokal Terhadap Pembangunan Jalur Trekking Di Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

Ayundha Maretha ^{a,1}, Ida Ayu Suryasih ^{a,2}, I Made Bayu Ariwangsa ^{a,3}

¹ayaycorp@gmail.com, ²iasuryasih@unud.ac.id, ³bayu_ariwangsa@unud.ac.id

^a Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Jl. Sri Ratu Mahendradatta Bukit Jimbaran, Badung, Bali

Abstract

This research explores the involvement of local communities in the development of a trekking route in Telaga Tawang Village, Sidemen District, Karangasem Regency. The village, known for its agrarian landscape, offers unique natural and cultural potential for community-based tourism (CBT). The study aims to understand the level and nature of local community participation in the planning, implementation, and evaluation stages of the trekking trail development. A qualitative descriptive approach was employed, gathering data through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using a snowball sampling technique, involving village officials, Pokdarwis (tourism awareness groups), BUMDes (village-owned enterprises), and local farmers. The research findings reveal that local community participation was most prominent during the implementation phase, where community members actively engaged in construction through mutual cooperation and self-funded efforts. Additionally, the community utilized the trekking route for economic benefits, including guiding services and local product sales, contributing to the village's economic growth. However, participation in the early planning and evaluation stages was limited, with decision-making mainly driven by village leaders and tourism stakeholders. The study highlights the need for inclusive participatory mechanisms throughout all stages of development, particularly in planning and evaluation, to ensure sustainability. Strengthening community capacity through training and establishing an evaluation and maintenance team for the trekking route are crucial steps to ensure that the tourism initiative continues to thrive while maintaining cultural and environmental integrity. This research contributes to the understanding of community involvement in rural tourism development and the application of CBT principles in sustainable tourism.

Keywords: Community Participation, Trekking Route, Rural Development, Pokdarwis, Telaga Tawang, Community-Based Tourism, Nature Tourism

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, terutama bagi wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi relevan karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai budaya. CBT menjadi sarana untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam setiap tahap pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di wilayah pedesaan seperti Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menjadi salah satu contoh penerapan prinsip CBT.

Desa ini memiliki karakteristik agraris dengan lanskap sawah terasering, perbukitan hijau, dan tata kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional Bali. Potensi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman wisata berbasis alam dan budaya lokal. Sejak tahun 2025, masyarakat desa bersama dengan

pihak desa mulai merintis pembangunan jalur trekking sebagai bagian dari strategi pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan dan partisipatif. Pembangunan jalur trekking tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur penunjang kegiatan wisata, tetapi juga sebagai media untuk mengenalkan kekayaan lokal kepada wisatawan. Jalur tersebut melewati area persawahan, kebun milik warga, serta titik-titik budaya seperti pura dan rumah adat. Dengan demikian, jalur trekking menjadi representasi langsung dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, dan menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi melalui jasa pemanduan, penjualan produk lokal, serta pengelolaan fasilitas penunjang wisata. Namun demikian, pembangunan pariwisata yang ideal tidak hanya diukur dari keberhasilan fisik atau peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan, sementara proses perencanaan dan evaluasi didominasi oleh pihak luar atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan distribusi manfaat, konflik kepentingan, hingga rendahnya rasa memiliki terhadap program pariwisata yang dibangun. Berdasarkan konteks

tersebut, penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap peran masyarakat lokal dalam pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang. Penelitian ini menjadi penting karena menilai keterlibatan masyarakat sejak awal proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Partisipasi masyarakat dilihat bukan sekadar dari sisi tenaga kerja atau kontribusi fisik, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, pemanfaatan peluang ekonomi, serta peran dalam evaluasi dan pemeliharaan jalur trekking yang telah dibangun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Desa Telaga Tawang terlibat dalam pembangunan jalur trekking, baik dalam bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan pendekatan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980), penelitian ini mengkaji dimensi-dimensi partisipasi yang terjadi di lapangan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterlibatan masyarakat.

Dengan memahami pola partisipasi masyarakat secara komprehensif, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep CBT di wilayah pedesaan, serta menjadi acuan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merancang program pariwisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam terkait bentuk dan peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks secara kontekstual dan apa adanya berdasarkan perspektif para pelaku di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, serta pengumpulan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dianggap memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembangunan jalur trekking, termasuk aparat desa, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengelola BUMDes, dan warga yang wilayahnya dilewati jalur trekking. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai proses, tantangan, serta pandangan mereka terhadap pembangunan jalur tersebut. Observasi langsung dilakukan di lokasi jalur trekking untuk mengamati bentuk partisipasi nyata masyarakat, kondisi fisik jalur, serta aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitarnya. Sementara itu, dokumentasi berupa arsip desa, foto kegiatan gotong royong, berita acara, serta dokumen

Pokdarwis turut digunakan sebagai sumber pendukung yang melengkapi data primer.

Penentuan informan menggunakan metode snowball sampling, yaitu teknik yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi informan kunci secara bertahap berdasarkan rekomendasi dari informan sebelumnya. Teknik ini digunakan karena sifat data yang bersifat kualitatif dan membutuhkan kedekatan sosial antara peneliti dan subjek, sehingga pemilihan informan lebih tepat sasaran dan relevan dengan fokus penelitian.

Lokasi penelitian berpusat di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, khususnya di sepanjang jalur trekking yang telah diresmikan pada tanggal 17 Mei 2025. Jalur tersebut menjadi titik observasi utama karena mencerminkan hasil nyata dari proses partisipatif masyarakat dan pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata berbasis lingkungan dan budaya. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan kerangka teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1980), yang membagi partisipasi masyarakat ke dalam empat kategori utama, yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, serta partisipasi dalam evaluasi. Setiap kategori dianalisis secara terpisah untuk menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal terjadi dalam masing-masing tahap pembangunan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber, metode, dan dokumen. Validasi ini penting untuk menghindari bias dan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan secara objektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Telaga Tawang

Gambar I. Peta Desa Telaga Tawang



(Sumber: Hasil Peneliti, 2025)

Desa Telaga Tawang memiliki lanskap perbukitan, sawah terasering, dan sungai yang mendukung pengembangan wisata trekking. Masyarakat desa masih sangat bergantung pada pertanian dan perkebunan, dengan pola sosial gotong royong yang kuat. Desa Telaga Tawang memiliki batas wilayah yang secara administratif menyentuh dan berbatasan langsung dengan lima desa lain yang ada di Kabupaten Karangasem, yakni Desa Sidemen yang terletak di bagian utara, Desa Sangkan Gunung

dan Desa Wisma Kertha yang berada di bagian barat, Desa Talibeng di bagian selatan, dan Desa Gegelang yang terletak di sisi timur.

Pembagian Wilayah dan Administrasi Desa Telaga Tawang

Desa Telaga Tawang secara administratif terbagi menjadi beberapa unit wilayah yang lebih kecil yang dikenal dengan istilah banjar dinas, yang mana pembagian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan pemerintahan desa serta meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di berbagai sudut desa tersebut. Adapun kelima banjar dinas yang terdapat di Desa Telaga Tawang ini antara lain adalah Banjar Dinas Lantang Katik, Banjar Dinas Kebon, Banjar Dinas Telaga Tawang, Banjar Dinas Kebung, serta Banjar Dinas Kebung Kauh, yang mana masing-masing banjar dinas memiliki batas wilayah dan kewenangan tersendiri sesuai dengan peraturan desa yang berlaku. Kelima banjar dinas ini menempati lahan seluas kurang lebih 297 hektar, yang digunakan untuk berbagai keperluan dan aktivitas masyarakat sehari-hari, mulai dari kawasan permukiman, pekarangan rumah warga, area persawahan yang menjadi sumber penghidupan petani lokal, lahan perkebunan yang ditanami dengan berbagai tanaman produktif, hingga bangunan-bangunan umum yang berfungsi sebagai fasilitas umum seperti balai desa, tempat ibadah, dan fasilitas sosial lainnya.

Demografi Penduduk Desa Telaga Tawang

Karakteristik demografi Desa Telaga Tawang menunjukkan bahwa desa ini termasuk dalam kategori dengan jumlah penduduk menengah. Hal ini mengindikasikan adanya potensi sosial yang cukup besar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai agenda pembangunan yang bersifat partisipatif. Terlebih lagi, proporsi penduduk yang berada dalam usia produktif, yakni antara 15 hingga 64 tahun, cukup dominan. Kondisi ini memberikan keunggulan tersendiri dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang dapat berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, serta pembangunan yang berbasis pada potensi lokal desa. Dari sisi ekonomi, sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencarhiannya pada sektor-sektor tradisional, seperti pertanian sawah dan ladang, aktivitas perkebunan, serta usaha mikro berbasis pemanfaatan sumber daya alam lokal. Situasi ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam proses pembangunan desa, khususnya jika dikaitkan dengan upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata yang berbasis keberlanjutan lingkungan, seperti pembangunan jalur trekking.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, implementasi, hingga

pengelolaan jalur trekking menjadi peluang untuk menciptakan manfaat ekonomi secara langsung bagi warga. Selain itu, keterlibatan tersebut juga berkontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas khas desa. Oleh karena itu, pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang tidak hanya dimaknai sebagai strategi peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Struktur Sosial Masyarakat di Desa Telaga Tawang

Struktur sosial dan budaya masyarakat Desa Telaga Tawang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Selain terbagi dalam lima wilayah administratif banjar dinas, kehidupan masyarakat juga dikuatkan oleh keberadaan tujuh banjar adat, yaitu Banjar Adat Lantang Katik, Kebon, Banyu Campah, Bloncing, Bloncing Kelod, Kebung, dan Kebung Kauh. Banjar adat memegang peranan penting, khususnya dalam urusan sosial, budaya, dan keagamaan.

Gambar II. Latihan Tari di Desa Telaga Tawang



(Sumber: Hasil peneliti, 2025)

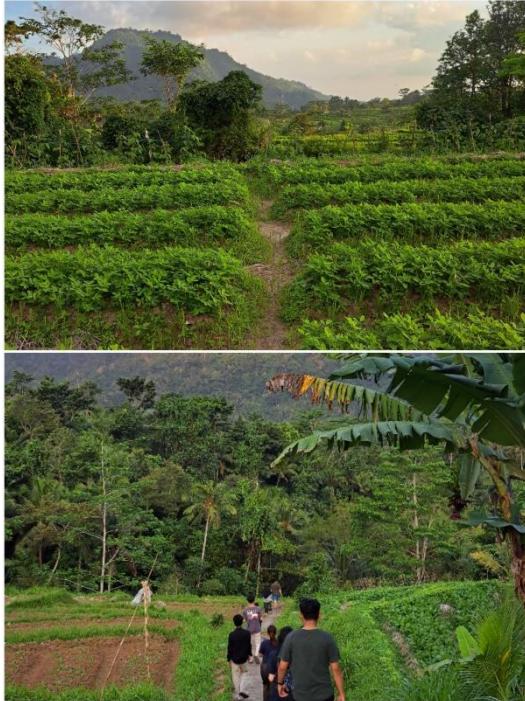
Fungsi banjar adat tidak hanya sebatas menjaga tradisi dan pelaksanaan upacara keagamaan, tetapi juga menjadi wadah musyawarah untuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Dengan demikian, masyarakat desa ini menunjukkan pola hubungan sosial yang bersifat kolektif dan mengedepankan prinsip musyawarah dalam setiap kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan desa. Harmonisasi antara lembaga pemerintahan desa dan struktur adat mencerminkan sistem sosial yang seimbang. Pemerintahan formal

berjalan berdampingan dengan norma adat, sehingga segala bentuk kegiatan masyarakat dapat terlaksana tanpa mengesampingkan nilai-nilai lokal yang sudah mengakar kuat sejak sebelum era administrasi modern.

Potensi Desa Telaga Tawang

Desa Telaga Tawang memiliki kekayaan sumber daya alam dan sosial budaya yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat. Secara geografis, desa ini terletak di kawasan dataran tinggi dengan lanskap perbukitan, udara sejuk, serta panorama alam seperti sawah berundak dan aliran sungai alami. Kondisi ini menjadikan desa sebagai lokasi ideal untuk pengembangan wisata trekking dan agrowisata.

Gambar III. Lahan Pertanian Warga Desa Telaga Tawang



(Sumber: Hasil peneliti, 2025)

Sebagian besar lahan desa dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan, yang tidak hanya mendukung kebutuhan pangan lokal, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Potensi ini membuka peluang untuk menghadirkan wisata edukatif yang memperkenalkan praktik pertanian tradisional Bali kepada wisatawan. Selain keunggulan alam, masyarakat Telaga Tawang memiliki kekuatan sosial budaya yang terjaga kuat. Nilai-nilai adat, kesenian tradisional, serta pelaksanaan upacara keagamaan rutin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang mencari pengalaman otentik. Kearifan lokal ini merupakan modal sosial penting dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelestarian budaya. Dari sisi kelembagaan, keberadaan

Pokdarwis, BUMDes, serta dukungan dari pemerintahan desa dan banjar adat menunjukkan kesiapan masyarakat dalam mengelola potensi desa secara terarah. Kelembagaan ini memainkan peran strategis dalam mendorong keterlibatan warga dalam program pembangunan, termasuk pembangunan jalur trekking. Dengan sinergi antara potensi alam, budaya, dan struktur kelembagaan lokal, Desa Telaga Tawang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

Peran Masyarakat Lokal dalam Proses Awal Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

1) Proses Perencanaan dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Jalur Trekking

Pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang merupakan salah satu bentuk inisiatif awal yang dijalankan dalam kerangka pengembangan desa wisata berbasis potensi alam dan kekayaan budaya lokal. Upaya ini tidak semata-mata bertujuan untuk menciptakan destinasi wisata baru, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam tahap awal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, keterlibatan aktif masyarakat memegang peranan sentral guna memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalur trekking muncul dalam berbagai bentuk, dengan fokus utama pada tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

Gambar IV Proses Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang



(Sumber: Dokumentasi KKN PM, 2024)

Hal ini diketahui melalui data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan berbagai informan kunci yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Proses perencanaan pembangunan

jalur trekking dilakukan secara bertahap dan terstruktur, yang berarti bahwa setiap tahapan dirancang dengan sistematis dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam struktur sosial masyarakat desa. Pelibatan masyarakat tidak dilakukan secara simbolik, melainkan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif, di mana suara dan pendapat masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Sejumlah tokoh dan unsur penting dalam masyarakat turut berperan dalam perencanaan ini, antara lain kepala desa selaku pemimpin pemerintahan lokal, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga representatif warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang memiliki peran strategis dalam mendukung inisiatif pembangunan, kepala dusun dan perangkat desa sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta pelaku usaha pariwisata, kepala subbagian (kasubag), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang secara langsung terlibat dalam pengembangan destinasi wisata di desa.

Keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut menjadi indikasi adanya sinergi antara lembaga formal dan komunitas adat dalam merumuskan arah pembangunan. Hal ini juga mencerminkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dijalankan secara top-down, melainkan melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang memungkinkan terjadinya konsensus. Selain itu, perencanaan pembangunan jalur trekking tidak hanya berfokus pada penciptaan infrastruktur fisik semata, seperti penentuan dan pembangunan rute trekking, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, upaya pemberdayaan masyarakat lokal dilakukan agar warga dapat turut serta dalam kegiatan wisata dan memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Di sisi lain, pelestarian lingkungan menjadi perhatian penting agar pembangunan tidak merusak ekosistem yang menjadi aset utama wisata. Selain itu, nilai-nilai budaya dan tradisi lokal juga tetap dijaga agar pembangunan yang berlangsung tidak menggeser identitas dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan pendekatan seperti ini, pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang sejalan dengan prinsip-prinsip Community-Based Tourism (CBT), di mana masyarakat lokal tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat dari pariwisata, tetapi sebagai pelaku utama yang terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memiliki kontrol atas arah pembangunan desa mereka sendiri, sekaligus menciptakan rasa kepemilikan terhadap aset wisata yang dibangun secara kolektif. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian integral dari

strategi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada nilai-nilai lokal dan memperkuat kapasitas sosial komunitas desa.

a) Sosialisasi Awal dan Pembangunan Jalur Trekking

Tahapan awal perencanaan pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang dimulai dengan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dalam forum ini, berbagai elemen masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan Pokdarwis diberikan ruang untuk menyampaikan ide, harapan, serta kekhawatiran mereka terhadap rencana pembangunan. Beberapa isu penting yang muncul meliputi pelestarian lingkungan, perlindungan situs budaya dan spiritual, serta keadilan distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan trekking. Meski keputusan teknis sebagian besar ditentukan oleh tokoh masyarakat dan aparat desa, proses ini mencerminkan partisipasi representatif, walau belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan warga. Setelah itu, dilakukan pemetaan partisipatif di mana masyarakat terlibat dalam menentukan titik-titik potensial jalur trekking, seperti persawahan, hutan bambu, sungai kecil, air terjun, dan pura. Titik-titik yang dianggap sakral oleh masyarakat adat dikeluarkan dari jalur utama demi menjaga nilai-nilai kultural lokal.

Rancangan jalur kemudian dibahas dalam musyawarah desa secara demokratis, menekankan prinsip kesepakatan bersama dan keadilan sosial. Proses ini menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan kolektif. Berdasarkan keterangan informan, pembangunan jalur trekking berjalan tanpa konflik karena warga merasa dilibatkan sejak awal. Hasil kesepakatan ini dimasukkan ke dalam dokumen resmi perencanaan desa seperti RKPDes dan RPJMDes, sehingga program memperoleh legitimasi hukum dan bisa diajukan untuk pendanaan dari Dana Desa, CSR, atau dukungan swasta.

b) Keterlibatan dalam Perencanaan Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Pada tahap awal perencanaan pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang, proses pelibatan masyarakat dilakukan melalui pendekatan konsultatif yang mencerminkan keterlibatan aktif dari berbagai unsur lokal. Tokoh masyarakat, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta sejumlah petani yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai jalur-jalur tradisional yang telah lama digunakan oleh warga untuk aktivitas pertanian dan kegiatan sehari-hari, menjadi pihak yang pertama kali dilibatkan. Mereka tidak hanya diminta untuk memberikan pandangan secara umum, tetapi juga

berkontribusi secara konkret dalam menyusun rencana rute trekking yang dinilai layak dan sesuai dengan kondisi lapangan. Penentuan rute tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah desa bersama masyarakat mempertimbangkan sejumlah aspek penting, antara lain kemudahan akses bagi wisatawan, tingkat keamanan jalur yang akan dilalui, serta keberlanjutan dari penggunaan lahan, khususnya lahan pertanian yang menjadi basis utama penghidupan masyarakat desa. Dalam forum-forum musyawarah desa, masukan dari warga dikumpulkan secara terbuka, termasuk kekhawatiran mereka terhadap potensi dampak pembangunan jalur terhadap produktivitas pertanian dan ruang hidup tradisional masyarakat. Pemerintah desa secara aktif membuka ruang dialog untuk mendengar pandangan dan kekhawatiran warga, dengan tujuan membangun kesepahaman agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Meskipun tidak seluruh warga dapat terlibat secara langsung dalam proses teknis penyusunan rute jalur trekking, ada konsensus umum bahwa pembangunan tersebut tidak boleh mengganggu aktivitas pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Kesepakatan ini menjadi indikator penting bahwa masyarakat tetap memiliki suara dalam arah pembangunan yang sedang dijalankan. Peran mereka dalam memberikan masukan menjadi landasan dalam menyusun rencana yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi desa. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini menunjukkan bentuk partisipasi yang bersifat konsultatif, di mana pendapat, saran, dan informasi lokal dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak perencana sebelum keputusan akhir diambil. Mengacu pada teori partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1980), bentuk keterlibatan tersebut termasuk dalam kategori partisipasi pada tahap pengambilan keputusan. Hal ini menandakan bahwa meskipun belum menyeluruh secara partisipatif, proses perencanaan telah membuka ruang keterlibatan masyarakat dan menunjukkan adanya pengakuan terhadap pengetahuan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah.

c) Dukungan Swadaya dan Kontribusi Masyarakat terhadap Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Salah satu karakter khas dalam pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang adalah kuatnya semangat swadaya dari masyarakat. Warga berkontribusi melalui tenaga, menyumbang bahan bangunan sederhana, serta menyediakan waktu untuk kegiatan gotong royong. Sumber dana awal berasal dari alokasi Dana Desa yang mendukung pembiayaan tahap awal pembangunan. Dorongan utama partisipasi masyarakat berasal dari harapan akan manfaat ekonomi serta rasa kepemilikan terhadap lingkungan sekitarnya. Jalur trekking

dipandang tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi masyarakat sendiri, baik dalam hal akses mobilitas maupun peningkatan citra desa. Selanjutnya, masyarakat juga dilibatkan dalam tahap sosialisasi dan pelatihan. Mereka diberikan pembekalan mengenai pengelolaan wisata, pelayanan kepada pengunjung, pelestarian lingkungan, hingga aspek keselamatan. Dengan demikian, pembangunan jalur trekking tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga membentuk kesiapan sosial masyarakat untuk mengelola wisata berbasis komunitas secara berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan gotong royong yang menjadi ciri khas inisiatif pariwisata berbasis masyarakat. Setelah perencanaan disepakati dalam forum musyawarah desa, masyarakat turut terlibat dalam pekerjaan teknis seperti membuka jalur, membersihkan semak belukar, menata rute, hingga membangun titik-titik istirahat. Selain peran dalam aspek fisik, masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan berkelanjutan jalur tersebut.

d) Peran Kelembagaan Lokal sebagai Penggerak terhadap Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Dalam pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang, Pokdarwis Gangga Amerta memainkan peran sentral sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kelompok ini berperan dalam merancang rute, mengordinasikan pertemuan warga, hingga mengatur pengelolaan harian jalur trekking. Di sisi lain, pemerintah desa memberikan dukungan administratif serta menjaga legitimasi kegiatan pembangunan. Pembangunan jalur trekking dijalankan sebagai salah satu unit usaha milik BUMDes, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengelola potensi dan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan ini tidak memerlukan izin langsung dari Dinas Pariwisata, karena desa memiliki wewenang penuh atas wilayah dan kegiatan yang berbasis potensi lokal.

Gambar V. Peresmian Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang



(Sumber: Hasil Peneliti, 2025)

Pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam memberikan jaminan hukum dan kemudahan dalam layanan publik yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha wisata tersebut. Pengelolaan jalur trekking melibatkan Pokdarwis sebagai operator utama, yang mengatur arus wisatawan, sistem pemanduan, serta perawatan dan evaluasi berkala. Warga lokal juga berpartisipasi sebagai pemandu, pengelola homestay, dan pelaku UMKM. Prinsip pengelolaan berbasis partisipasi ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan destinasi wisata. Pembangunan dilakukan melalui kerja gotong royong, melibatkan 20 orang pekerja lokal yang terdiri dari pemuda, perempuan, dan petani. Proyek ini dikoordinasikan oleh BUMDes dan Pokdarwis, mencakup penyediaan bahan, penggeraan fisik, hingga pengawasan di lapangan. Seluruh dana bersumber dari Dana Desa, dan kegiatan dikelola penuh oleh kelembagaan desa. Hasil dari kegiatan trekking menjadi sumber pendapatan yang kemudian dialokasikan ke berbagai pihak seperti pemerintah desa, banjar, kasubag, BUMDes, dan Pokdarwis. Skema ini mencerminkan semangat "dari masyarakat untuk masyarakat", serta memperkuat komitmen desa dalam mengembangkan pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk mendukung operasional Pokdarwis sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan lokal dalam sektor pariwisata.

2) Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

a) Pelaksanaan Fisik Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Masyarakat Desa Telaga Tawang turut aktif dalam pelaksanaan pembangunan jalur trekking melalui kerja bakti seperti membuka jalur, menyusun batu sebagai pijakan, serta memasang papan penunjuk arah. Kegiatan ini mencerminkan bentuk partisipasi pelaksanaan menurut kerangka Cohen dan Uphoff (1980). Selain meningkatkan sarana wisata, pembangunan jalur ini juga memperbaiki infrastruktur pendukung aktivitas sehari-hari warga, seperti akses jalan dan ruang publik. Secara sosial dan ekonomi, jalur trekking membawa dampak positif bagi masyarakat. Salah satu manfaat paling nyata adalah peningkatan aksesibilitas lahan pertanian. Sebelum dibangun, medan menuju lahan cukup sulit, terutama saat musim hujan. Kehadiran jalur ini mempermudah mobilitas hasil panen ke pemukiman atau pasar, sehingga mendukung efisiensi waktu dan biaya distribusi. Dengan demikian, jalur trekking tidak hanya berfungsi sebagai sarana wisata, tetapi juga sebagai jalan usaha

tani yang meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, jalur trekking menjadi daya tarik utama dalam pengembangan ekowisata dan wisata petualangan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memberi kontribusi pada pendapatan desa melalui sistem retribusi, di mana tiket hanya dikenakan kepada wisatawan, sementara warga tetap bebas menggunakan untuk aktivitas harian. Dari sisi lingkungan, pembangunan jalur tidak menimbulkan kerusakan ekologi. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan tidak ada gejala erosi, pencemaran air, atau kerusakan sistem irigasi. Hal ini karena pembangunan menggunakan jalur lama yang telah lama dimanfaatkan masyarakat, sehingga tidak mengubah fungsi lahan secara drastis. Secara umum, pembangunan ini melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan.

Namun, distribusi manfaat belum merata. Meskipun pendekatan partisipatif telah diterapkan, masih diperlukan penguatan dalam pembagian hasil agar keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat dapat tercapai secara adil dan menyeluruh.

b) Pemanfaatan Hasil Pembangunan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Pembahasan ini menyoroti bagaimana masyarakat Desa Telaga Tawang mendapatkan manfaat dari pembangunan jalur trekking, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kerangka Community-Based Tourism (CBT), pemanfaatan hasil merupakan indikator penting yang mencerminkan kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalur trekking telah membuka berbagai bentuk peluang ekonomi, pemberdayaan sosial, serta mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan. Manfaat yang dirasakan masyarakat bervariasi tergantung pada profesi mereka. Bagi petani, jalur ini memberikan akses yang lebih baik ke lahan pertanian sekaligus peluang tambahan untuk menjual hasil produksi atau membuka warung kecil di sepanjang jalur. Bagi pemuda desa, pembangunan ini menjadi sarana untuk bekerja sebagai pemandu wisata dan mempelajari keterampilan baru, termasuk komunikasi lintas bahasa. Pengelola homestay juga mendapatkan keuntungan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Pembangunan ini tidak hanya memunculkan peluang baru, tetapi juga memperkuat struktur sosial melalui pembentukan Pokdarwis Gangga Amerta. Kelompok ini dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, dan secara resmi diakui oleh Dinas Pariwisata untuk menjalankan fungsi pengelolaan jalur trekking.

Gambar VI. Jalan Santai bersama Warga pada saat Peresmian Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang



(Sumber: Hasil peneliti, 2025)

Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, kapasitas masyarakat dalam mengelola pariwisata terus meningkat. Selain itu, pembangunan jalur trekking menciptakan peluang kerja yang lebih luas, khususnya bagi perempuan dan generasi muda. Muncul berbagai jenis usaha baru, seperti warung, homestay, produksi kerajinan, dan jasa persewaan alat trekking. UMKM lokal mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari segi jumlah maupun kualitas usaha. Pokdarwis dan BUMDes turut mendorong pertumbuhan ini melalui pelatihan kewirausahaan dan dukungan kelembagaan. Pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke jasa dan perdagangan menjadi indikasi bahwa pembangunan jalur trekking berkontribusi pada transformasi ekonomi desa. Kegiatan ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan kemandirian desa. Dengan demikian, jalur trekking di Desa Telaga Tawang tidak hanya menjadi sarana wisata, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

c) Evaluasi dan Pemeliharaan Jalur Trekking di Desa Telaga Tawang

Sebagian warga Desa Telaga Tawang secara perlahan mulai menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kondisi fisik jalur trekking yang telah dibangun, meskipun upaya evaluatif tersebut belum difasilitasi melalui mekanisme formal dan sistematis oleh lembaga desa maupun kelompok pengelola wisata. Bentuk partisipasi masyarakat dalam hal evaluasi lebih banyak muncul secara spontan dan berdasarkan pada pengalaman langsung sebagai pengguna jalur, terutama oleh kalangan petani dan warga yang sehari-harinya melintasi area tersebut untuk keperluan pertanian atau aktivitas lainnya. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi ini adalah ketika warga, seperti para petani yang menggunakan jalur tersebut, menyampaikan informasi atau masukan kepada pihak Pokdarwis atau perangkat desa terkait kondisi jalur yang dirasa berbahaya, misalnya bagian yang terlalu curam, licin, atau berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Proses penyampaian masukan ini dilakukan secara informal, tanpa prosedur administratif

tertentu, namun tetap diterima dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hal ini menjadi indikasi bahwa meskipun belum tersedia sistem evaluasi yang terorganisir secara kelembagaan, telah tumbuh kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai pentingnya menjaga keselamatan dan kenyamanan jalur trekking. Kesadaran ini muncul dari interaksi langsung warga dengan lingkungan mereka, serta dari rasa tanggung jawab sosial terhadap keberlangsungan fungsi jalur sebagai sarana wisata sekaligus akses pendukung kegiatan pertanian.

Selain evaluasi dalam bentuk pemberian masukan, bentuk keterlibatan lain yang tak kalah penting adalah partisipasi warga dalam kegiatan pemeliharaan ringan terhadap jalur trekking. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri oleh warga, seperti membersihkan ranting dan dedaunan yang jatuh, memperbaiki batu pijakan yang bergeser, atau sekadar memastikan jalur tetap bersih dan layak dilalui. Tindakan-tindakan ini dilakukan bukan semata-mata atas dasar instruksi, tetapi lebih sebagai inisiatif pribadi yang berangkat dari rasa memiliki terhadap jalur tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai memandang jalur trekking bukan hanya sebagai proyek pembangunan fisik semata, melainkan sebagai bagian dari lingkungan hidup mereka yang patut dijaga dan dirawat bersama.

Keterlibatan seperti ini memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism/CBT), karena memperlihatkan tumbuhnya relasi emosional dan tanggung jawab bersama antara warga dan aset pariwisata desa. Namun demikian, jika dilihat dari keseluruhan proses pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang, tingkat partisipasi masyarakat menunjukkan pola yang tidak merata. Keterlibatan paling menonjol tampak pada tahap pelaksanaan, seperti saat kegiatan gotong royong pembukaan jalur dan penyusunan rute, serta pada tahap pemanfaatan hasil, yakni saat masyarakat mulai mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan jalur trekking, seperti menjadi pemandu wisata, membuka warung, atau menyediakan jasa homestay. Sementara itu, pada tahap perencanaan awal dan evaluasi pasca pembangunan, partisipasi masyarakat masih cenderung terbatas dan belum melibatkan seluruh lapisan warga secara optimal.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980), kondisi partisipasi masyarakat Desa Telaga Tawang dapat dikategorikan sebagai partisipasi parsial, di mana keikutsertaan masyarakat kuat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan, namun belum menyeluruh pada tahap perencanaan dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk meningkatkan keterlibatan warga secara lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif dan sistem

evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, penting pula bagi desa untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan transparan, agar masyarakat merasa lebih memiliki saluran yang formal dan aman dalam menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran terhadap pengelolaan pariwisata desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan jalur trekking maupun sektor pariwisata lainnya di Desa Telaga Tawang dapat tumbuh secara menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, sesuai dengan prinsip dasar pembangunan pariwisata berbasis komunitas yang inklusif dan berkeadilan.

IV. KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan jalur trekking di Desa Telaga Tawang telah dimulai sejak tahap perencanaan awal. Namun demikian, partisipasi tersebut masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti Pokdarwis dan perangkat desa. Inisiatif pengembangan jalur ini sebagian besar diprakarsai oleh Pokdarwis dengan dukungan dari pemerintah desa, sementara keterlibatan masyarakat secara luas lebih menonjol pada tahap pelaksanaan fisik di lapangan. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat tampak aktif, khususnya dalam bentuk gotong royong untuk membuka jalur, membersihkan area, dan memasang papan penunjuk arah. Sedangkan pada tahap pemanfaatan, masyarakat mulai merespons secara positif dengan memanfaatkan peluang ekonomi, seperti membuka usaha warung, menjadi pemandu wisata, hingga menjual produk lokal. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi dan pemeliharaan masih dilakukan secara informal dan belum terorganisasi secara sistematis. Meskipun demikian, hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepemilikan masyarakat terhadap jalur trekking sebagai bagian dari aset bersama desa. Secara keseluruhan, pembangunan jalur trekking telah memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat, meskipun masih perlu penguatan di aspek perencanaan yang inklusif dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.

Saran

Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan jalur trekking sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Telaga Tawang, terdapat dua hal utama yang perlu menjadi perhatian ke depan. Pertama, penting dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat lokal, khususnya dalam hal kepemanduan wisata, standar keselamatan pengunjung, pelayanan, dan penguasaan media promosi digital. Pelatihan-

pelatihan yang berfokus pada bidang tersebut dapat menjadi bekal penting bagi warga desa agar mampu berperan lebih aktif dan profesional dalam menyambut wisatawan serta mengelola kegiatan wisata secara mandiri. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan, masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga dapat berkembang sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi pariwisata desa. Kedua, untuk menjaga keberlanjutan fisik jalur trekking, perlu dibentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan evaluasi berkala dan pemeliharaan jalur. Tim ini sebaiknya melibatkan unsur masyarakat secara langsung, seperti anggota Pokdarwis, pemuda desa, petani, serta tokoh adat atau tokoh masyarakat yang memahami kondisi medan dan nilai-nilai lokal. Kehadiran tim ini akan memastikan bahwa jalur trekking tetap terpelihara dengan baik dan layak digunakan dalam jangka panjang, sekaligus menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menjaga aset desa secara kolektif. Pemeliharaan rutin dan evaluasi menyeluruh juga menjadi bentuk konkret tanggung jawab bersama terhadap kelestarian lingkungan dan keselamatan pengunjung. Dengan mengintegrasikan dua langkah strategis ini, pembangunan pariwisata di Desa Telaga Tawang diharapkan tidak hanya bertahan dalam waktu yang singkat, tetapi juga mampu berkembang sebagai model wisata desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiding, J. (2023). Pendampingan Perencanaan Jalur Interpretasi Wisata Trekking di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 4(1). 27-38.
- Abidin, J., Sahara, L. S., & Hasan, R. O. (2024). Perencanaan Wisata Trekking Gunung Rungking untuk Mengangkat Potensi Desa Cigunungsari. *Madaniya*. 5(3). 820-835.
- Al Ardi, R. D. (2021). Wisata Sejarah Kerajaan Berbasis Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Karangasem Taman Soekasad Bali. *Jurnal Al-Tatwir*, 8(1). 69-80.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, <https://doi.org/10.1080/01944366908977225> 35(4), 216-224.
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*. 8(1), 30-47.
- Badan Pusat Statistik. 2024. Perkembangan Pariwisata April 2024. Jakarta: Badan Pusat

- Statistik.
- Bharata, I. B. A. Y. (2023). Karakteristik Jalur Trekking sebagai Potensi Lanskap Wisata Alam di Desa Panji Anom. Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Bobsuni, N., & Ma'ruf, M. F. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). Publika, 215 226.
- Budiarta, I. P., dkk. (2017). Pengembangan Wisata Trekking Gunung Agung di Desa Selat Karangasem. Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS, 2(1), 10.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? Environment and Urbanization, <https://doi.org/10.1177/095624789500700106> 7(1), 173–204.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. World Development, 8(3), 213–235.
- Cole, S. (2006). Information and empowerment: The keys to achieving sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 14(6), 629–644.
- Eddyono, F. (2021). Pengelolaan destinasi pariwisata. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Fadhillah, R. A. (2021). Wawancara. Jakarta: UNJ PRESS.
- Farida, F., Jamain, T. H., & Kartika, D. G. (2024). Indeks Tingkat Kelayakan Daya Tarik Wisata Alam Hutan Pelangi Gunung Cupu Purwakarta. Journal of Tourism Destination and Attraction, 12(1), 39-50.
- Gunawan, R., & Subadi, W. (2021). Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bak Air di Rt. 15 Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. JAPB, 4(1), 521-528.
- Hamzah, F., & Hermawan, H., & Wigati. (2018). Evaluasi Dampak Pariwisata terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata, 5(3), 195 202
- Herdiana, D. (2019). Peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat. Jurnal Master Pariwisata (JUMPA), 6(1), 63-86.
- Hermawan, H., & Ghani, Y. A. (2018). Geowisata: Solusi Pemanfaatan Kekayaan Geologi yang Berwawasan Lingkungan.
- Kurniawan, W. (2015). Dampak sosial ekonomi pembangunan pariwisata umbul sidomukti kecamatan bandungan kabupaten semarang. Economics Development Analysis Journal, 4(4), 443-451.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. Jurnal Kajian Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1)
- Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2017). Peran pemerintah Kota Batu dalam implementasi kebijakan pembangunan pariwisata berdasarkan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 30(3), 260.
- Meirejeki, I. N., dkk. (2023). Penguatan Sumber Daya Manusia dan Penataan Jalur Trekking untuk Mendukung Pengembangan Wisata Tirta di Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Madaniya, 4(4). 1306-1321.
- Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. Strides in Development of Medical Education, 14(3), e67670. <https://doi.org/10.5812/sdme.67670>
- Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2022). Tantangan dan Peluang Pariwisata Berbasis Masyarakat di Era New Normal. Masyarakat Indonesia, 4(7), 91 104.
- Nuryanti, W. (1996). Heritage and postmodern tourism. Annals of Tourism Research, 23(2), 249–260. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(95\)00062-3](https://doi.org/10.1016/0160-7383(95)00062-3)
- Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. Indonesia Law Reform Journal, 1(2), 241-256.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. Kertha Wicaksana, 16(2), 164-171.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pitana, I. G., & Putu, G. (2009). Sosiologi Pariwisata: Yogyakarta: Andi.
- Putri, I. A. K. (2023). Identifikasi Persebaran Daya Tarik Wisata di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar Bali. Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies, 3(1), 54-74.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World Development, 23(8), 750X(95)00046-F 1247-1263. <https://doi.org/10.1016/0305>
- Rahmi, S. A. (2016). Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Kearifan Lokal. Reformasi, 6(1).
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
- Rosyadi, M. A., Farisi, H., & Safitri, A. (2025). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam

- Pengembangan UMKM Pariwisata di Purwokerto: Tantangan dan Strategi Untuk Era Digital. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(2), 521-533.
- Rózycki, P., & Dryglas, D. (2014). Trekking as a phenomenon of tourism in the modern world. *Acta Geoturistica*, 5(1), 24-40.
- Rusyidi, B., & Ferdryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155-165.
- Siregar, I. A. (2021). Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif. *Alacrity: Journal of Education*, 39-48.
- Suansri, P. (2003). Community based tourism handbook. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour-REST/Thailand Community-Based Tourism Institute (CBT-I).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukendra, I. K., Asrida, P. D., Purwati, N. K. R., Juwana, I. D. P., Fridayanthi, P. D., & Subrata, I. M. (2023). Pengembangan Objek Wisata Alam Berbasis Kearifan Lokal Berorientasi Etnomatematika di Desa Apuan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. *Widyadari*, 24(2), 286-298.
- Sutopo, H. B. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis lokal.
- Surakarta: UNS Press. Timothy, D. J. (1999). Participatory planningA view of tourism in Indonesia. *Annals of tourism research*, 26(2), 371-391.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- Wardana, I. G. A. F. W., & Adikampana, I. M. (2018). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 78.
- Wijaya, N. S., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). Community Based tourism (CBT) sebagai strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di DTW Ceking Desa Pekraman Tegallalang. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(1), 77-98.
- Wirawan, P. E., & Octaviani, V. (2022). Pengantar Pariwisata. Nilacakra. Yunikawati, N. A., dkk. (2021). Can Community Based Tourism (CBT) Support Sustainable Tourism in the Osing Traditional Village. In: E35 Web of Conferences. (Vol. 232, p. 02023). EDP Science